

GERAKAN
THE ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIAH (ISIS)
PERKEMBANGAN DAN DAMPAKNYA BAGI DUNIA INTERNASIONAL

OLEH
DR. NURFAIZI SUWANDI
DUBES LBBP RI DI KAIRO

KAIRO, NOVEMBER 2015

GERAKAN THE ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA (ISIS) PERKEMBANGAN DAN DAMPAKNYA BAGI DUNIA INTERNASIONAL

PENDAHULUAN

Arab Spring yang terjadi di kawasan Timur Tengah dalam beberapa tahun terakhir, telah mengguncang keseimbangan kekuasaan, menggulingkan penguasa di tiga negara Arab: Mesir, Libya, dan Tunisia. Situasi di seluruh kawasan tidak lagi sekedar persaingan regional ataupun pergantian penguasa regional sebagaimana terjadi pada awal setengah abad sebelumnya. Pertikaian yang muncul berkaitan dengan konflik kepentingan 3 kekuatan besar berlatar belakang ideologi dan situasi politik masing-masing negara.

Di kawasan Timur Tengah secara tidak langsung muncul tiga kekuatan ideologi politik yang memiliki tujuan yang saling berlawanan. Yang pertama, yaitu kekuatan berlatar belakang Syiah (meskipun tidak murni ideologi Syiah), dimotori oleh kekuatan Islamis yang ada di Iran, Irak, Suriah dan sebagian Lebanon. Yang kedua, ada kekuatan kelompok politik Islam di Arab seperti Ikhwanul Muslimin yang bertujuan membelokkan arah berbagai pemberontakan (Arab Spring) di negeri-negeri Arab tersebut menuju Islamisasi kawasan Timur Tengah secara bertahap, seperti yang terjadi di Mesir era Presiden Morsi. Kekuatan ini mendapat dukungan dari Qatar dan Turki. Yang ketiga, berlatar belakang Sunni, dimotori oleh Arab Saudi dan monarkhi Teluk lainnya seperti Kuwait, Uni Emirat Arab dan beberapa negara Arab lainnya.

Pertarungan antar tiga kekuatan dan isu-isu berlatar belakang ideologi kemudian muncul kelompok-kelompok jihadis dan mengalami penguatan di seluruh kawasan (Timur Tengah). Trend baru munculnya kelompok NIIS/ISIS dengan isu ideologi dan menyebar memanfaatkan negara-negara yang sedang kacau. Beberapa negara di Timur Tengah dan Afrika Utara menjadi target serangan dan masuknya ISIS

Dalam perkembangannya kemudian di Timur Tengah memasuki era koalisi baru. Pada September 2014, terbentuk koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat untuk memerangi kelompok Negara Islam di Irak dan Suriah di wilayah Irak dan Suriah. Pada Maret 2015, terbentuk koalisi Arab yang terdiri atas beberapa negara pimpinan Arab Saudi untuk memerangi pemberontak Al-Houthi dan loyalis mantan Presiden Ali Abdullah Saleh di Yaman. Setelah digulingkannya Presiden Muhammad Mursi yang berasal dari Ikhwanul Muslimin (IM) di Mesir oleh militer pada 3 Juli 2013, muncul kubu pro dan kontra IM di Timur Tengah. Pada 25 September 2015, telah dibentuk komite keamanan yang beranggotakan empat negara, yakni Rusia, Iran, Irak, dan Suriah, untuk memerangi NIIS/ISIS.

Mesir sendiri merupakan salah satu negara yang baik secara langsung atau tidak menjadi bagian dari pertarungan tiga kekuatan di Timur Tengah tersebut. Perkembangan situasi di Timur Tengah yang sangat dinamis, kemudian muncul isu-isu penting di mana Mesir menjadi bagian di dalamnya terutama dari tinjauan keamanan. Isu-isu penting tersebut, a.l. penyelesaian konflik Palestina – Israel, dinamika hubungan

Mesir – Qatar, hubungan Mesir – Arab Saudi, krisis keamanan di Suriah, krisis keamanan di Libya, peran Mesir sebagai mediator konflik di Libya maupun Palestina, serta penyebaran kelompok ISIS di kawasan. Di dalam negeri Mesir juga baru saja keluar dari krisis politik setelah menumbangkan kelompok IM.

Munculnya Arab Spring di negara-negara Arab memberikan angin segar bagi sel-sel teroris untuk muncul di permukaan di tengah kesibukan pemerintah dalam mengatasi situasi dalam negerinya. Beberapa negara terjadi kekacauan dan sampai saat ini belum terselesaikan. Mesir sempat menjadi salah satu negara yang terkena dampak Arab Spring, namun Mesir beruntung memiliki tentara yang kuat dan cukup kompak sehingga dapat menjaga keutuhan negaranya. Selain itu Mesir juga menerapkan aturan yang sangat otoriter. Penangkapan dan penahanan serta memberikan hukuman yang sangat berat bagi siapa saja yang terlibat dengan IM. Mengantisipasi adanya gerakan massa dengan memanfaatkan media, Mesir memberangus pers. Upaya Mesir menjaga negaranya dengan cara-cara yang kontroversial dengan manuver politik luar negerinya di kawasan serta penerapan cara-cara represif dalam penanggulangan gangguan keamanan di dalam negeri. Terlepas dari kritikan dan tidak menjunjung azas demokrasi Mesir sampai saat ini masih mampu menjaga keutuhan negaranya.

ISU KAWASAN

1. Penyelesaian Konflik Palestina-Israel

Meskipun Mesir memiliki konflik dengan kelompok Hamas, namun Mesir selalu menyatakan bahwa pihaknya terus mendukung berdirinya negara Palestina sesuai dengan batas wilayah yang ditetapkan pada 1967. Diantaranya beberapa upaya yang telah dilakukan Mesir dalam membantu Palestina selama tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Mesir berulang kali mengeluarkan pernyataan tegas mengutuk agresi Israel terhadap wilayah Jalur Gaza yang telah menewaskan 2.200 warga sipil Palestina dan mengakibatkan 100.000 orang lebih kehilangan tempat tinggal;
- b. Mesir juga selalu menggalang dukungan dan mendiskusikan solusi bagi konflik Palestina-Israel dalam berbagai kunjungan dan forum internasional;
- c. Pada Agustus 2014, Mesir berhasil memediasi gencatan senjata antara Palestina dan Israel;
- d. Mesir juga berhasil menjadi perantara antara Pemerintah dengan beberapa faksi di Palestina seperti HAMAS dan PLO dalam menyamakan persepsi dan sikap terkait penyelesaian konflik di Palestina;
- e. Pada 12 Oktober 2014, Pemerintah Mesir juga telah berhasil menggalang bantuan untuk Palestina sebesar USD 5.4 milyar dengan menyelenggarakan Konferensi Rekonstruksi Gaza di Cairo dan diikuti oleh berbagai Negara dari penjuru dunia termasuk Indonesia;

- f. Upaya pemerintah Mesir membantu Palestina diwarnai dengan adanya tuduhan Mesir terhadap pihak HAMAS melalui sayap militernya, Brigade Ezz Al Din Qassam yang dianggap terlibat dalam serangkaian serangan teroris di Mesir.
- g. Pada 28 Februari 2015, *The Cairo Court of Urgent Affairs* telah menetapkan bahwa Gerakan Perlawanan Islam di Palestina (HAMAS) sebagai organisasi teroris dengan tuduhan bahwa kelompok tersebut telah mencampuri urusan dalam negeri Mesir, diantaranya melalui keterlibatannya dalam operasi bersenjata yang menewaskan sejumlah aparat keamanan dan sipil di Mesir, khususnya di wilayah Semenanjung Sinai. Sebelumnya pengadilan yang sama juga telah menetapkan sayap militer HAMAS, Brigade Ezz Al-Din Qassam sebagai organisasi teroris pada 31 Januari 2015 karena tuduhan ikut terlibat dalam berbagai pemboman di Mesir. Pengadilan menyebutkan bahwa keterlibatan Al-Qassam dan HAMAS dalam berbagai aksi teror di Mesir telah memperlihatkan adanya perubahan sasaran pergerakan mereka yang semula melawan pendudukan Israel atas wilayah Palestina menjadi mengganggu stabilitas politik dan keamanan Mesir.

2. Perkembangan Positif Hubungan Mesir-Qatar

Hubungan antara Mesir dengan Qatar terutama pada 2014 banyak diwarnai dengan ketegangan. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Qatar memiliki hubungan yang dekat dengan Pemerintahan mantan Presiden Mohammed Morsi. Diantara bukti kedekatan tersebut antara lain :

- a. Sejak Revolusi 25 Januari 2011 hingga masa Pemerintahan mantan Presiden Mohammed Morsi, Qatar telah mengeluarkan dana bantuan untuk Mesir sebesar USD 8 milyar;
- b. Pemberitaan Chanel TV Al Jazeera yang berpusat di Doha dalam menyiarkan kritik tajam kepada Pemerintah Mesir dan secara terang-terangan menyebutkan bahwa penggulingan Morsi adalah sebuah 'Kudeta Militer';
- c. Pemerintah Qatar juga memberikan 'perlindungan' terhadap tokoh-tokoh IM yang melarikan diri dari Mesir;
- d. Pernyataan Kemlu Qatar pada Januari 2014 terkait kondisi Mesir yang pada intinya mengkhawatirkan iklim demokrasi dan kebebasan di Mesir.
- e. Akan tetapi sejak akhir tahun 2014, hubungan Mesir-Qatar cenderung menunjukkan perkembangan positif. Diantara indikator perbaikan hubungan kedua Negara adalah;
 - 1) Pernyataan akhir *Gulf Cooperation Council/GCC Summit ke-35* di Doha yang menyebutkan bahwa GCC (termasuk Qatar) telah sepakat untuk mendukung program Presiden Al Sisi khususnya dalam menyelesaikan *roadmap* transisi Mesir;

- 2) Pada Desember 2014, Presiden Mesir Abdul Fattah Al Sisi telah menerima kunjungan Utusan Khusus Emir Qatardan Utusan Khusus Raja Arab Saudi di Cairo untuk membicarakan upaya rekonsiliasi hubungan kedua Negara;
- 3) Pihak Qatar juga telah menutup siaran *Chanel TV Al Jazeera Live Egypt* yang sering menyiarkan kritik tajam terhadap Pemerintah Mesir saat ini. Selain itu, Qatar juga telah 'mengusir' sejumlah tokoh-tokoh IM yang mencari perlindungan di Doha;
- 4) Pemerintah Mesir telah menunjukkan respon balik dengan mawacanakan pembebasan beberapa jurnalis dan wartawan Al Jazeera yang ditahan di Mesir.
- 5) Hubungan Mesir dengan Qatar semakin mencair di mana pada Konferensi Ekonomi di Sharm El Sheikh, Maret 2015, Emir Qatar, Tamim bin Hamad berpartisipasi menghadiri acara tersebut.

3. Konflik di Libya dan Ancaman ISIS

Pemerintah Mesir menjadikan krisis keamanan di Libya sebagai salah satu isu sentral kebijakan luar negerinya. Hal ini dikarenakan secara letak geografis, Mesir berbatasan langsung dengan Libya dengan wilayah perbatasan berupa garis padang pasir sepanjang 1.049 km dengan penjagaan yang sulit dilakukan oleh kedua Negara. Kondisi tersebut membuat stabilitas keamanan di Libya akan sangat berpengaruh terhadap kondisi keamanan dalam negeri Mesir.

- a. Secara umum, Mesir selalu mendukung Pemerintah terpilih dan Rakyat Libya dalam memerangi kelompok teroris dan mengembalikan stabilitas keamanan negaranya. Dalam membantu menyelesaikan krisis keamanan di Libya, Mesir secara aktif telah berperan menggalang dukungan baik dalam sejumlah pertemuan bilateral maupun forum-forum internasional.
- b. Pada 15 Februari 2015, kelompok teroris ISIS di Libya mengunggah video di youtube tentang proses eksekusi mati 21 penganut Kristen koptik Mesir. Setelah munculnya video tersebut di media sosial twitter dan youtube keluarga korban akhirnya mempercayai bahwa para korban telah tewas dieksekusi mati oleh kelompok ISIS dengan cara disembelih di salah satu tepi pantai Libya. Begitu juga pemerintah Mesir langsung memberikan respond atas peristiwa tersebut.
- c. Setelah munculnya video tersebut Presiden Abdel Fattah Al Sisi langsung mengadakan rapat darurat bersama Dewan Pertahanan Nasional dan menyampaikan pidatonya sebagai respon ancaman aksi ISIS Libya terhadap pemerintah dan rakyat Mesir.

- d. Pada 16 Februari 2015, dini hari, AU Mesir sesuai dengan amanat dari Pusat Komando Angkatan Bersenjata Mesir mengirimkan 6 (enam) pesawat F-16 untuk melancarkan serangan udara yang dikoordinasikan dengan Otoritas Libya untuk menarget pusat persembunyian kelompok ISIS di kota Derna, Libya yang telah membunuh 21 WN Mesir. beberapa jam setelah operasi serangan udara, Angkatan Bersenjata Mesir mengumumkan keberhasilan dalam menghancurkan tempat persembunyian, penyimpanan senjata dan pelatihan kelompok ISIS di kota Derna, Libya.
- e. Munculnya ISIS di Libya
- 1) Munculnya nama "Daash/ISIS" di Libya pada pertengahan 2013 yang diawali dengan kelompok bernama "Pasukan Tentara Mesir Bebas" yang unjuk diri pasca lengsernya mantan Presiden Mohammed Morsi dan setelah tragedy bentrok berdarah di perbatasan Mesir dengan Angkatan Bersenjata. Setelah itu menghilang beberapa waktu dan muncul kembali pada November 2014 dengan menduduki kota Derna-Libya yang dihuni sekitar 100.000 jiwa. Disanalah mereka mendirikan benteng pertahanan pertama "Negara Islam" yang mengendalikan kekuasaan cukup luas mencakup berbagai daerah di Irak dan Suriah, setelah Abu Bakar Al-Baghdadi mendeklarasikan diri sebagai Khalifah atau pimpinan tertinggi Daash/ISIS dan mengajak jihadis di Negara-negara selain Irak-Suriah untuk mengambil baiat, dimana ia juga menyebutkan telah menduduki Kota Derna, Libya.
 - 2) Pada masa jeda antara menghilang atau bersembunyi dengan kemunculannya menjadi ISIS, kelompok tersebut juga telah muncul di kota tersebut secara perlahan, dimana menurut pengakuan warga setempat unsur-unsur ISIS menerapkan hukum dan sistem syari'at Islam. Seperti larangan wanita untuk keluar rumah setelah Shalat Maghrib, wajib mengenakan hijab bagi perempuan sampai para pelajar di jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan memisahkan antara sekolah laki-laki dan perempuan.
 - 3) Kemudian kepemimpinan organisasi ISIS di Libya diambil alih oleh Abu Nabil Anbari, WN Irak yang telah dikenal baik oleh Al-Baghdadi ketika mereka berdua tinggal di salah satu barak tahanan AS di Irak. Di kota Derna, Nabil Anbari mampu mengendalikan seluruh aspek kehidupan diantaranya instalasi-instalasi administratif, pengadilan dan lembaga-lembaga pendidikan. Sampai bisa mendirikan stasiun radio lokal. Selain itu elemen-elemen ISIS juga melakukan patroli terorganisir di dalam Kota, sama seperti daerah-daerah yang telah dikuasainya di Irak dan Suriah.
 - 4) Sejak pengausaan ISIS terhadap kota Derna, mereka menargetkan sejumlah pemberontak diantaranya adalah politisi, pengacara, wartawan dan Tentara Libya, bahkan penduduk yang menentang sistem yang dijalankan kelompok. Lalu milisi-milisi yang bergabung dengan "Negara

Islam/*Islamic State* (IS)" mulai membentuk kantor-kantor pusat dan pos-pos perlindungan di sejumlah kota di pesisir Libya, seperti Benghazi, Sirte, Al-Khums bahkan sampai ibu kota Tripoli.

- 5) Setelah invasi udara yang dilancarkan Angkatan Bersenjata Mesir pada 16 Februari 2015, menggunakan jet tempur F16 "Mark 82" bekerjasama dengan Tentara Nasional Libya terhadap sejumlah benteng pertahanan ISIS dianggap berhasil dan 90% tepat mengenai 8 (delapan) titik sasaran yang dituju. Sejak saat itu aktivitas ISIS di Kota tersebut mulai berkurang.

4. Krisis Keamanan di Suriah

Pada masa pemerintahan Morsi, Mesir memberikan dukungan penuh kepada kelompok-kelompok anti pemerintah di Suriah. Namun di era Pemerintahan Transisi, Mesir lebih mengedepankan solusi politik bagi penyelesaian krisis keamanan dan konflik yang terjadi di Suriah.

- a. Menlu Mesir, Sameh Hassan Shoukry, menyatakan bahwa Mesir mendukung solusi politik sesuai dengan keinginan rakyat Suriah dan kesepakatan bersama antar kelompok dan kekuatan politik Suriah. Ditambahkan bahwa hal tersebut penting dilakukan guna menghentikan penderitaan rakyat sipil yang terus menjadi korban dari konflik dan krisis keamanan di Suriah.
- b. Pemerintah Mesir juga secara aktif melakukan koordinasi dan komunikasi dengan sejumlah Negara baik di kawasan ataupun internasional dalam rangka mengkampanyekan dan menggalang dukungan bagi terwujudnya solusi politik di Suriah.
- c. Di Suriah, saat ini selain Kelompok ISIS, terdapat Kelompok Front Al Nushrah yang merupakan pewaris resmi Kelompok Al Qaeda di Suriah yang memiliki kekuasaan secara politik, militer dan ekonomi di berbagai daerah. Selain itu juga terdapat Kelompok FSA (Front Syrian Army) yang menguasai kawasan yang lebih luas dan mendapatkan bantuan dari beberapa Negara seperti AS dan NATO. Sama halnya dengan kelompok ISIS, Kelompok Front Al Nushrah memiliki anggota dari puluhan warga Negara seperti Mesir, Perancis, Palestina, Negara Teluk dan Negara Barat lainnya.
- d. Upaya menggempur ISIS di Suriah kemudian muncul dua koalisi kekuatan, yaitu dari NATO yang dimotori Amerika dan koalisi yang dimotori Rusia di mana tujuannya untuk melawan ISIS dan mendukung kepemimpinan Bashar As'ad. Mesir sendiri tidak tergabung dalam koalisi namun secara tidak langsung setuju terhadap serangan Rusia di Suriah, dikarenakan kedekatan Mesir dengan Rusia saat ini.

5. Hubungan Mesir – Arab Saudi

Mesir dan Arab Saudi seperti yang telah diketahui saat ini yaitu terjadinya perbedaan pendapat yang menyebabkan penundaan penandatanganan pembentukan "Pasukan Gabungan Arab" yang disepakati di Kairo.

- a. Arab Saudi sengaja menunda mengeluarkan pernyataan bersama untuk negara-negara Arab guna menyetujui pembentukan "Pasukan Gabungan Arab" sesuai sikap Mesir terhadap isu-isu regional. Arab Saudi dan negara-negara yang mendukung gagasan tersebut belum menandatangani keputusan pembentukan "Pasukan Gabungan Arab" itu dikarenakan tidak sepeham dengan visi Mesir yang melihat kebutuhan untuk pembentukan "Pasukan Gabungan Arab" itu secepatnya akan digunakan dalam penyelesaian beberapa misi militer di negara-negara tetangga seperti Libya.
- b. Faktor penyebab penundaan pembentukan "Pasukan Gabungan Arab" adalah sikap yang kontras dalam penyikapan terhadap krisis Suriah. Meskipun faktanya bahwa Arab Saudi dan Mesir berusaha untuk menjaga hubungan baik melalui pernyataan terus-menerus tentang kekuatan hubungan antara kedua negara, namun jelas bahwa hubungan Mesir-Saudi yang tidak dalam kondisi terbaiknya, dan kebijakan Mesir terhadap krisis Suriah adalah alasan utama untuk menghentikan penundaan pembentukan "Pasukan Gabungan Arab" di mana Mesir merupakan pendukung terbesar Pasukan Gabungan tersebut.

6. Ancaman ISIS di Kawasan

Trend ancaman teroris di kawasan saat ini yaitu serangan kelompok ISIS yang menargetkan negara-negara yang dianggap liberal dan sekuler seperti halnya di Mesir dan Tunisia.

- a. Pada 24 November 2015, terjadi ledakan bom bunuh diri di dekat Istana Negara Tunisia menarget rombongan bus Paspampres mengakibatkan 15 personalia Paspampres, gugur. Kemudian, kelompok ISIS mengklaim terlibat dalam ledakan tersebut dan pada 26 November 2015, menyatakan mendeklarasikan kelompok ISIS Wilayah Burqah (Tunis). Sebelumnya pada 26 Juni 2015, di Tunisia juga terjadi serangan teroris menargetkan dua hotel di kota pesisir negara Tunisia tepatnya di kawasan pelabuhan El Kantaoui dekat "kota Sousse" yang berjarak 150 km (93 mile) dari ibukota Tunisia. Pelaku menyerang wisatawan yang berada di sepanjang pantai antara hotel Soviva and Imperial Marhaba yang menyebabkan 39 orang tewas dan 38 lainnya luka-luka. Sebelum kedua insiden serangan tersebut, Tunisia juga mengalami serangan teroris, yaitu pada bulan Maret 2015 lalu dengan serangan dua teroris terhadap museum Bardo di ibukota Tunisia yang menewaskan 21 turis asing.

- b. Kelompok Islamis Radikal dan Teroris menganggap Revolusi Mesir 30 Juni 2013 dan kemenangan Presiden Tunis Al Baji Qaid Al Sibsi pada Pilpres Tunis 2014 adalah kegagalan 'Proyek Islamisasi' kelompok Islamis Radikal dan Teroris, karena 'dicuri' oleh elemen liberal dan sekuler.
- c. Serangan teror di Tunisia terhadap turis asing di kawasan wisata dan beberapa aksi serangan teror di Mesir di mana kemudian kelompok ISIS mengklaim bertanggung jawab merupakan strategi kelompok ISIS untuk menyampaikan pesan bahwa negara Timur Tengah ataupun Afrika Utara anti negara barat dan jangan ada lagi yang bepergian ke sana. Selain itu ISIS ingin semakin disegani di dunia dan menaikkan citra mereka untuk menarik simpati bagi banyak orang yang ingin melakukan jihad untuk bergabung.

PERMASALAHAN POLITIK DAN KEAMANAN MESIR

1. Perlawanan Ikhwanul Muslimin (IM)

- 1) Perlawanan kelompok IM terhadap rezim berkuasa pasca tergulingnya presiden Morsi 3 Juli 2013 masih terus terjadi selama tahun 2014. Meskipun frekuensi bentrokan langsung antara pendukung rezim Morsi (mayoritas dari kelompok IM) dengan aparat keamanan menurun, namun aksi-aksi gerakan "bawah tanah" untuk melawan pemerintah terus berlangsung, seperti peristiwa penembakan terhadap aparat dan pemboman kantor-kantor pemerintah serta pos-pos keamanan (*security checkpoint*)
- 2) Aksi-aksi kekerasan dan teror yang terus dilakukan oleh kelompok IM pasca tergulingnya Presiden Morsi telah menyebabkan Pemerintah Mesir memasukkan IM ke dalam daftar kelompok teroris pada 25 Desember 2013 dan menangkap serta menghukum para pemimpin dan pendukung IM. Bahkan pada awal 2015, Pemerintah Mesir kembali menggencarkan penelurusan serta pembekuan asset atau dana para individu maupun pihak-pihak lain yang terkait dengan IM.
- 3) Selama tahun 2014 tercatat sekitar 1.400 orang anggota Ikhwanul Muslimin (IM) dihukum mati oleh Pengadilan Tinggi Mesir. sebanyak 529 dipidana mati terkait kasus kerusuhan di Distrik Mathay-Provinsi Minya serta 188 orang terkait kasus bentrok di Distrik Kardasah-Provinsi Giza. Namun setelah melalui proses banding dan mendapatkan pandangan dari Grand Mufti Mesir diputuskan bahwa 529 terdakwa kasus pertama ditetapkan (28/4) pidana hukuman mati kepada 37 orang. Sedangkan untuk 623 terdakwa kasus kedua ditetapkan (21/06) pidana hukuman mati terhadap 183 orang. Harian Nasional Mesir, *Syarq Aswat*, memberitakan (30/12) bahwa jumlah terpidana kasus kekerasan yang dilakukan IM sejak tergulingnya Presiden Morsi hingga 21 Juli 2014 tercatat 1.697 orang, putusan bebas sebanyak 3.714 orang dan yang dipenjarakan menunggu keputusan pengadilan sebanyak 7.389 orang.

- 4) Keputusan yang sangat kontroversial tersebut telah menimbulkan berbagai kritikan dan kecaman dari berbagai kalangan baik dalam dan luar negeri termasuk dari Sekjen PBB, Amerika Serikat dan Uni Eropa. Dikatakan bahwa besarnya jumlah terpidana dan cepatnya proses persidangan membuat banyak kalangan meragukan independensi proses peradilan dalam mengambil keputusan tersebut. Menanggapi beragam reaksi tersebut, Menteri Kehakiman Mesir menegaskan bahwa proses peradilan sudah sesuai dengan konstitusi yang berlaku dan menyatakan kesiapannya untuk menjawab seluruh pertanyaan dan klarifikasi yang diinginkan.
- 5) Sementara pada 16 Juni 2015, Pengadilan Tindak Pidana Cairo telah mengeluarkan 2 putusan hukuman bagi mantan Presiden Muhammad Morsi, yaitu: Pada perkara pertama, Muhammad Morsi dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas tuduhan melakukan kegiatan spionase dengan Hamas, Pada perkara kedua yaitu pembobolan Penjara Wadi'el Nathroun, Buhaira, Morsi dijatuhi hukuman mati bersama Muhammad Badi' (Ketua Umum/Mursyid IM) dan Sa'ad Khatatni (Ketua Freedom and Justice Party (FJP) (Sayap Politik IM). Selain itu, pengadilan Cairo juga menjatuhkan hukuman mati kepada 3 tokoh penting IM yaitu Khairat Shatir (Waketum IM), Muhammad Beltaghi (Sekjen Freedom and Justice Party –FJP / Sayap Politik IM) dan Ahmad Abdel 'Ati (Kepala Kantor Kepresidenan masa Presiden Mursi).
- 6) Pertentangan dan aksi-aksi perlawanan kelompok IM terhadap pemerintahan Mesir diperkirakan masih akan terus berlanjut pada tahun 2016. Hal ini disebabkan kelompok IM hingga saat ini masih tetap pada tuntutan dasarnya yaitu meminta agar Mohammed Morsi dikembalikan kekuasaannya menjadi presiden karena dipilih secara *legitimate* melalui pemilu 2012 yang dinilai demokratis, sedangkan pemerintahan pasca Morsi dinilai tidak *legitimate* karena hasil kudeta.

2. Pemberlakuan UU Demonstrasi

- a. Masalah aksi-aksi demonstrasi yang dimotori oleh para mahasiswa guna menentang rezim berkuasa juga mewarnai Mesir pada tahun 2014. Aksi-aksi tersebut dipicu oleh adanya pemberlakuan UU Demonstrasi oleh pemerintah di akhir tahun 2013. Para demonstran mengkritik keras bahwa UU tersebut (pasal 2 dan pasal 8 tentang izin untuk berdemonstrasi) telah membungkam kebebasan berpendapat di Mesir dan menuduh pemerintah bersikap otoriter dengan meningkatkan peran aparat keamanan dalam mengontrol aktivitas masyarakat. Sementara itu, pihak pemerintah menjelaskan bahwa UU tersebut ditujukan untuk menciptakan ketertiban masyarakat dengan mengatur tata cara berdemonstrasi karena telah menggunakan kekerasan dan telah menewaskan ribuan korban selama tahun 2013. Salah satu media oposisi mencatat bahwa selama tahun 2014 telah terjadi sekitar 2.274 aksi demonstrasi di Mesir.

- b. Oleh karena itu, tuntutan berbagai pihak terkait UU Demonstrasi pada 2015, khususnya dari kelompok sekuler dan kiri maupun kelompok-kelompok Islamis yang masih beraliansi dengan IM, diprediksi akan terus mewujudkan *good governance* sebagaimana kehendak para pendukung revolusi 25 Januari 2011, serta citra pelaksanaan demokratisasi Mesir di mata internasional.

3. Kebebasan Pers

Media selalu memainkan peran penting di Mesir dan kawasan. Namun di Mesir terjadi perubahan signifikan dalam dua dasawarsa terakhir, yang berpuncak pada pengenalan media sosial yang secara strategis digunakan oleh kelompok revolusioner untuk mengedepankan keinginan mereka sekaligus menumbangkan rezim Mubarak. Pasca jatuhnya Mubarak, dua penguasa Mesir terlihat lebih keras terhadap media dibandingkan pendahulunya. Polarisasi media yang dimulai di masa Morsi semakin memburuk setelah penggulingannya. Media terbagi atas yang pro-rezim di satu sisi dan Al-Jazeera di sisi lain. Di tengah-tengah terdapat beberapa suara individu yang berusaha netral. Polarisasi media ini mencerminkan polarisasi dalam masyarakat.

- a. Sepanjang tahun 2014, pemerintah menahan dan memidanakan para wartawan. Menurut Komite Perlindungan Wartawan, hingga Desember 2014, 12 wartawan dipenjarakan, sembilan diantaranya ditahan sejak 2013. Kasus paling menonjol adalah pemenjaraan tiga jurnalis jaringan televisi Qatar, Al Jazeera—Peter Greste, WN Australia; Mohamed Adel Fahmy, dwi kewarganegaraan Kanada dan Mesir, dan Baher Mohamed, WN Mesir. Mereka ditahan pada akhir 2013 dan dipidana pada Juni 2014 dengan tuduhan menyebarkan berita palsu dan membantu *Muslim Brotherhood*. Greste dan Fahmy divonis tujuh tahun penjara, sementara Mohamed dikenakan 10 tahun penjara karena tambahan tuduhan memiliki amunisi. Meskipun dunia internasional menghimbau pembebasan mereka karena tidak adanya bukti kuat di pengadilan, namun mereka tetap dipenjara hingga akhir tahun 2014. Pada Februari 2015, Greste dideportasi ke Australia. Dua minggu setelah deportasi Greste, Fahmy dan Mohamed dibebaskan dengan jaminan, dengan tambahan Fahmy yang harus menanggalkan kewarganegaraan Mesirnya.
- b. Pemerintah Mesir tidak membuat kemajuan dalam pembuatan RUU Kebebasan Informasi yang sudah diperdebatkan sejak 2013. Pada November 2014, kabinet mempertimbangkan RUU yang melarang publikasi informasi yang terkait dengan Angkatan Bersenjata, baik cetak, radio, televisi maupun media sosial. Larangan terkait dengan analisis dan investigasi, statistik dan data mengenai aset dan strategi militer, dan "informasi lain yang dapat mengganggu keamanan anggota angkatan bersenjata." Pelanggaran terhadap hal ini dapat dikenakan pidana penjara 6 bulan hingga lima tahun dan denda antara EGP 10.000 – 50.000 (USD 1.400 – USD 7.000). Salah satu lembaga survey internasional telah menempatkan Mesir di peringkat 159 dari 180 negara yang disurvei dalam Indeks Kebebasan Pers 2014.

- c. Pada 2015, di bidang media, Mesir tetap mendapatkan nilai rendah dalam hal kebebasan bagi pers. Kasus penahanan jurnalis sekaligus aktivis HAM Hossam Bahgat merupakan salah satu kasus menonjol di Mesir. Penahanan Hossam Bahgat bahkan mengundang Sekjen PBB berkomentar bahwa Mesir melanggar Kebebasan untuk Berekspresi. Bahgat yang merupakan pendiri *Egyptian Initiative for Personal Rights* ditahan atas tuduhan "menyebarkan rumor palsu dengan tujuan untuk mengganggu ketertiban umum dan keamanan". Beberapa perwakilan Mesir di luar negeri antara lain di Tunis, New York, Berlin dan London didemo karena kasus ini. Hossam Bahgat adalah aktivis dan jurnalis yang sering mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah Mesir terutama yang terkait dengan hak asasi manusia, hak-hak sipil dan ekonomi.

4. Konflik di Kawasan Sinai

- a. Situasi keamanan di kawasan Sinai selama tahun 2014 dinilai masih terus mencekam. Hal ini terlihat dari berbagai serangan kelompok radikal di Sinai yang terus belangsung terhadap aparat keamanan, pos-pos penjagaan (*security checkpoints*) dan penghancuran berbagai instalasi vital lainnya. serangan kelompok radikal yang terbesar terjadi pada tanggal 24 Oktober 2014 yang menewaskan 31 apkam serta melukai 30 orang lainnya. *Al Ahram Weekly (18-31 Desember 2014)* menyebutnya sebagai serangan terbesar kelompok radikal terhadap pihak keamanan dalam decade terakhir. Akibat dari serangan tersebut, Presiden Abdel Fattah Al Sisi pada hari yang sama mengumumkan keadaan darurat selama 3 (tiga) bulan di wilayah Sinai dan memberlakukan jam malam.
- b. Selanjutnya, untuk menciptakan stabilitas keamanan di Sinai, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan antara lain: penutupan sementara gerbang perbatasan Rafah ke Gaza, pengaktifan Kesepakatan Liba Arab tahun 1998 tentang pemberantasan terorisme dan pembentukan zona penyangga (*buffer zone*) seluas 12 km sepanjang wilayah perbatasan dengan Gaza, Palestina.
- c. Selama tahun 2014, aparat keamanan telah melancarkan sekurangnya 80 kali operasi militer dan menewaskan sekitar 1.062 anggota militan, menangkap sekitar 1.000 orang lainnya dan menghancurkan sekitar 2.800 terowongan di wilayah perbatasan dengan Gaza yang selama ini digunakan oleh kelompok-kelompok radikal untuk memasukkan orang dan berbagai jenis senjata ilegal ke Mesir. (Ahrum Online 05/01/2015).
- d. Pada 31 Oktober 2015, pesawat jenis Airbush 321 maskapai sipil Kogalymavia milik Rusia bernomor penerbangan KGL 96268 yang membawa 214 penumpang WN Rusia dan 3 WN Ukarina serta 7 crew jatuh di tengah Semenanjung Sinai tepatnya setelah bertolak dari bandara internasional Sharm El Sheikh Mesir. Insiden jatuhnya pesawat penumpang Rusia tersebut menurut

hasil penyelidikan dari beberapa negara dikarenakan adanya bom yang dimasukkan di dalam bagasi pesawat, meskipun pihak Mesir masih berupaya menutup kasus tersebut sampai hasil penyelidikan tuntas. Akibat kejadian tersebut beberapa negara melarang pesawatnya terbang ke Mesir, bahkan Rusia melarang pesawat Mesir, Egypt Air terbang ke Rusia.

- e. Pada 24 November 2015, di Swiss Inn Hotel, el Arish, Sinai Utara terjadi aksi serangan bom dan serangan bersenjata. Serangan terjadi pada pagi hari ketika mobil yang berisi bom, dikendarai oleh sel teroris berusaha mendekati ke hotel tempat para hakim menginap di Swiss Inn Hotel, el Arish. Oleh Apkam mobil tersebut dihadang dengan tembakan sehingga terjadi baku tembak dengan sel teroris pengendara mobil, dan mobil tersebut diledakkan oleh pelaku ketika mendekati lokasi hotel. Sementara apkam sibuk dengan bom mobil, dua penyerang lebih menyelip ke hotel. Satu meledakkan dirinya di dapur hotel dengan rompi bom bunuh diri, sementara yang lain melepaskan tembakan secara acak di sebuah kamar di dalam hotel, yang menewaskan salah satu hakim. Akibat kejadian tersebut 7 orang tewas, termasuk 4 polisi, 2 hakim pemantau Pemilu Legislatif dan seorang warga sipil. Selain itu juga melukai 12 orang yang saat itu berada di tempat kejadian.
- f. Permasalahan di Sinai tersebut diperkirakan masih akan berlanjut mengingat masih terdapat sekitar 20 ribu anggota kelompok militan dari berbagai kelompok radikal yang berbeda bemarkas di daerah tersebut. *Ansar Beit al-Maqdis* disebut sebagai kelompok yang paling radikal dan telah mendeklarasikan dirinya bergabung dengan ISIS pada 14 November 2014. Masalah lainnya adanya penolakan keras dari masyarakat di Sinai untuk dipindahkan dan menjadikan wilayah tersebut menjadi *buffer zone* yang dinilai untuk memenuhi kepentingan pihak Israel.
- g. Beberapa faktor lainnya yang menyebabkan tumbuh suburnya kelompok radikal di Sinai dan sulit untuk diberantas, antara lain karena kondisi demografi kawasan Sinai yang luas dan berbukit-bukit serta dihuni oleh masyarakat Arab Baduy yang selama ini dinaggap sebagai 'warga kelas dua'; tingkat kemajuan dan kemakmuran Provinsi Sinai Utara jauh dibawah provinsi lainnya; adanya hubungan dengan kelompok Hamas

UPAYA MESIR MEREDAM PENGARUH KONFLIK DI KAWASAN

Konflik kawasan sangat berdampak terhadap Mesir, sehingga terus berupaya berperan aktif dalam upaya menjaga stabilitas kawasan dengan mencoba mencari solusi konflik di Negara tetangganya. Upaya Mesir tersebut untuk mencegah dampak konflik di kawasan berpengaruh terhadap negaranya. Mesir melakukan dua pendekatan dalam melakukan upaya menghadapi aksi-aksi teror dan ideologi radikal di negaranya sebagai dampak konflik kawasan dengan cara *Soft Power* dan *Hard Power*. Hal ini dikarenakan penanggulangan terorisme dan radikalisme membutuhkan strategi yang komprehensif.

Keberhasilan Mesir menjaga negaranya dari dampak konflik kawasan (Arab Spring) tidak terlepas dari upaya-upaya represif. Sementara upaya Mesir dalam penanggulangan terorisme tidak hanya bergantung kepada tindakan keamanan, namun ada beberapa solusi lain yang dikedepankan mencakup sisi keamanan, politik, sosial, intelektual, pendidikan dan wacana keagamaan.

1. Pendekatan *Soft Power*

- a. Mesir menutup beberapa sekolah yang dimiliki oleh Ikhwanul Muslimin serta mengganti guru-gurunya yang berideologi Ikhwanul Muslimin. Selain itu juga merevisi beberapa buku pelajaran yang dianggap membangkitkan semangat Ikhwanul Muslimin.
- b. Mesir menutup bisnis yang dimiliki anggota Ikhwanul Muslimin untuk mengantisipasi adanya pendanaan kepada Ikhwanul Muslimin dari hasil bisnis tersebut.
- c. Pemerintah Mesir telah melarang 55.000 ulama tak berlisensi memberikan khotbah di masjid-masjid. Keputusan ini diambil sebagai salah satu upaya menekan para simpatisan mantan Presiden Mohammed Morsi. Larangan ini terutama ditujukan ke masjid-masjid kecil yang tak memiliki izin pemerintah di seluruh wilayah Mesir. Pemerintah juga berharap langkah ini mampu menyebarkan pesan-pesan Islam yang lebih moderat dan menjauhkan rakyat Mesir dari pemikiran radikal.
- d. Mesir dibantu oleh Al Azhar terus mengembangkan metode penyebaran Islam moderat guna mencegah berkembangnya ideologi radikal. Bahkan beberapa ulama Al Azhar pernah diundang oleh beberapa lembaga pemerintah maupun organisasi Islam untuk memberikan ceramah tentang Islam moderat, yaitu Sheikh Amr El Wardhani. Selain itu di Mesir juga ada mantan tokoh-tokoh Islam garis keras yang saat ini membantu pemerintah Mesir memerangi pemikiran radikal seperti mantan Ketua Dewan Syura Jamaah Islamiyan Mesir, dr. Najih Ibrahim dan mantan Juru bicara Jamaah Islamiyah, Hisyam Al Najjar juga pernah diundang ke Indonesia untuk membagikan pengalamannya serta mengajak memerangi pemikiran radikal.

2. Pendekatan *Hard Power*, beberapa diantaranya yaitu :

- a. Mesir melarang aktivitas organisasi Ikhwanul Muslimin dan *underbouwnnya* serta memutuskan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris. Pengadilan Mesir memutuskan hukuman mati bagi ribuan anggota Ikhwanul Muslimin yang terlibat aksi-aksi kekerasan.
- b. Pengadilan Mesir *The Cairo Court of Urgent Affairs* memutuskan organisasi Hamas dan sayap militernya Brigade Ezz Al Din Qassam sebagai organisasi teroris karena dianggap terlibat dalam serangkaian serangan teroris di Mesir

dan telah mencampuri urusan dalam negeri Mesir. Diantaranya terlibat dalam operasi bersenjata yang menewaskan sejumlah aparat keamanan dan sipil di Mesir, khususnya di wilayah Semenanjung Sinai.

- c. Mesir terus menerus melakukan operasi militer, terutama di Sinai Utara untuk memerangi sel-sel teroris dari kelompok Anshar Bayt Al Maqdis yang sudah berbaiat kepada ISIS. Selain itu Mesir juga membantu Libya memerangi milisi-milisi Islam dan memberantas kelompok ISIS yang telah membunuh 21 WN Mesir penganut Kristen Koptik.
- d. Mesir menerapkan aturan keras bagi para demonstran dengan memberlakukan UU Demonstrasi. Hal ini menimbulkan kontroversi dan kritikan dari berbagai pihak di mana Mesir dianggap tidak memberikan ruang bagi demokrasi.
- e. Media yang dianggap sangat berperan dalam membentuk opini diberangus oleh pemerintah Mesir. Pada November 2014, kabinet mempertimbangkan RUU yang melarang publikasi informasi yang terkait dengan Angkatan Bersenjata, baik cetak, radio, televisi maupun media sosial. Larangan terkait dengan analisis dan investigasi, statistik dan data mengenai aset dan strategi militer, dan "informasi lain yang dapat mengganggu keamanan anggota angkatan bersenjata." Pelanggaran terhadap hal ini dapat dikenakan pidana penjara 6 bulan hingga lima tahun dan denda antara EGP 10.000 – 50.000 (USD 1.400 – USD 7.000). Salah satu lembaga survey internasional telah menempatkan Mesir di peringkat 159 dari 180 negara yang disurvei dalam Indeks Kebebasan Pers 2014. Pada 2015, di bidang media, Mesir tetap mendapatkan nilai rendah dalam hal kebebasan pers.

ANALISIS

1. Beberapa upaya Mesir menjaga negaranya dari pengaruh konflik kawasan yang sudah dilakukan seperti tersebut di atas yaitu berperan aktif sebagai mediator dalam penyelesaian konflik Israel – Palestina. Konflik Israel-Palestina yang naik turun eskalasinya juga sangat bergantung Mesir dalam kapasitasnya sebagai mediator kunci, mengingat posisi strategis Mesir di kawasan. Namun di saat Mesir berperan aktif melakukan mediasi banyak bermunculan aksi-aksi teror di berbagai wilayah terutama di Sinai Utara. Mesir mencurigai bahwa kelompok Hamas melalui sayap militernya terlibat dalam berbagai serangan teroris yang menimbulkan korban jiwa baik aparat keamanan maupun warga sipil. Pengadilan Mesir kemudian menetapkan Hamas dan Brigade Ezz Al Din Qassam sebagai organisasi teroris. Hal ini nampaknya sebagai upaya Mesir menekan Hamas dan sayap militernya untuk tidak terlibat dalam aksi-aksi teror. Selain itu juga meminta Hamas yang satu ideologi dengan IM untuk tidak lagi mencampuri urusan politik dalam negeri Mesir. Beberapa waktu yang lalu Mesir kemudian mencabut keputusannya yang memasukkan Hamas sebagai organisasi teroris.

2. Hubungan Mesir-Qatar sempat tegang pada 2014 saat Qatar dekat dengan mantan Presiden Morsi mengkritik Mesir bahwa penggulingan Presiden Morsi adalah sebuah kudeta militer. Pemerintah Qatar juga memberikan perlindungan terhadap tokoh-tokoh IM yang melarikan diri dari Mesir seperti Yusuf Qardawi. Saat ini hubungan Mesir-Qatar menunjukkan perkembangan positif di mana Qatar sepakat mendukung program Presiden Mesir, Abdel Fattah Al Sisi menyelesaikan *roadmap* transisi Mesir. Sementara pemerintahan Mesir memberikan respon baik dengan mewacanakan pembebasan jurnalis dan wartawan Al Jazeera yang ditahan Mesir. Membaiknya hubungan Mesir-Qatar menunjukkan membaiknya situasi di kawasan dan memudahkan Mesir berkonsentrasi menyelesaikan percepatan perbaikan ekonomi yang sangat mendesak. Cairnya hubungan juga ditandai dengan hadirnya Emir Qatar dalam konferensi ekonomi Mesir di Sharm El Sheikh pada Maret 2015.
3. Mesir juga berperan aktif ikut membantu penyelesaian krisis keamanan dan konflik di Suriah. Pada masa pemerintahan Presiden Morsi, Mesir memberikan dukungan terhadap kelompok anti pemerintah Suriah sehingga membuat situasi di Suriah semakin sulit. Tujuan Mesir membantu penyelesaian krisis di Suriah guna menghentikan penderitaan rakyat sipil yang terus menjadi korban. Selain itu dampak konflik Suriah semakin suburnya sel-sel teroris dan maraknya warga Negara asing dari berbagai belahan dunia termasuk Mesir yang bergabung dengan kelompok ISIS maupun kelompok radikal lainnya. Hal ini berdampak masuknya ideologi radikal dari para jihadis baik yang disebar melalui media sosial maupun yang kembali ke Negara masing-masing termasuk Mesir. Selain itu Mesir yang saat ini dekat dengan Rusia akan berupaya menghormati kedekatannya tersebut dengan menjalin hubungan dengan Suriah yang saat ini didukung oleh Rusia.
4. Tidak dapat dipungkiri pasca revolusi yang menumbangkan kelompok IM, Mesir mendapat dukungan dari negara-negara sahabat baik berupa finansial maupun proyek-proyek yaitu dari Arab Saudi dan negara teluk lainnya. Seiring berjalannya waktu, keharmonisan Mesir dengan Arab Saudi ternyata tidak berlangsung lama dikarenakan adanya perbedaan kepentingan, saat Mesir menolak mengirimkan pasukan darat untuk membantu Yaman memerangi Syiah Houthi. Selain itu Mesir yang dinilai memberikan dukungan kepada pemerintah Suriah membuat Arab Saudi kecewa. Namun hubungan Mesir dengan Arab Saudi tetap berupaya dirajut karena masih ada kepentingan-kepentingan yang lainnya.
5. Konflik di Libya juga menyuburkan sel-sel teroris dan maraknya kelompok-kelompok radikal di negara tersebut termasuk ISIS. Kondisi stabilitas keamanan di Libya sangat berpengaruh terhadap kondisi keamanan dalam negeri Mesir yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Libya. Selain itu 21 WN Mesir penganut Kristen Koptik juga menjadi korban pembunuhan kelompok ISIS di Kota Derna, Libya. Mesir kemudian melakukan aksi erangan udara ke kantong-kantong basis militan ISIS. Munculnya ISIS di Libya juga tidak lepas dari pengaruh stabilitas politik di Mesir pasca lengsernya Presiden Morsi. Loyalis Morsi kemudian melarikan diri ke Libya dan kemudian mendirikan 'benteng pertahanan' Negara Islam dan selanjutnya berbaiat kepada ISIS.

6. Untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan di negaranya, pemerintah Mesir terus berupaya melakukan revisi UU maupun membuat aturan-aturan baru untuk mencegah dampak konflik kawasan terhadap Mesir, meskipun dengan cara-cara yang terkesan otoriter. Guna mencegah gangguan keamanan di dalam negerinya, Mesir menggunakan metode pendekatan *Soft Power* dan *Hard Power*.

KESIMPULAN

1. Kawasan Timur Tengah seperti diketahui sangat kental dengan gerakan nasionalismenya. Nasionalisme negara-negara Timur Tengah biasanya di dorong oleh elite dan ulama dengan mengeksploitasi keyakinan agama untuk mendorong kebencian sosial. Dalam konteks membangun demokrasi secara stabil di kawasan Timur Tengah, masih menjadi persoalan tersendiri. Persoalan ideologi dan sentimen nasionalisme sebagai akar penyebab konflik masih mendominasi. Masyarakat Timur Tengah sangat sensitif atas isu-isu nasionalisme dan agama kemudian terakumulasi menjadi tiga kekuatan ideologi politik. Pertarungan ketiga kekuatan tersebut menjadikan kawasan Timur Tengah sampai saat ini masih terus bergejolak.
2. Posisi Mesir di kawasan tidak terlepas dari bagian tiga kekuatan ideologi politik. Setelah lepas dari krisis politik Arab Spring, Mesir berupaya tetap menjaga hubungan dengan berbagai pihak. Hal ini penting agar dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk mendapat dukungan baik politik maupun ekonomi mengingat posisi geografis Mesir yang strategis. Selain dapat menjaga pengaruh-pengaruh dan ideologi radikal di negaranya.
3. Upaya Mesir memerangi anasir-anasir teroris di negaranya serta menangkal upaya-upaya pihak-pihak yang ingin mendiskreditkan rezim pemerintah saat ini terbukti masih cukup mampu membuat Mesir menjaga negaranya. Tentara Mesir yang kuat merupakan modal awal untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Namun apakah cara-cara Mesir dengan pendekatan *Soft Power* dan *Hard Power* nya mampu bertahan lama menjaga keutuhan negaranya, masih perlu dilihat lagi ke depan, terutama apabila dikaitkan dengan stabilitas ekonominya. Hal ini dikarenakan di era globalisasi di mana akses informasi sangat luas, masyarakat sudah bisa membuat perbandingan-perbandingan dengan negara lain.

SEKIAN